

PENGUNGKAPAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NARKOTIKA

(Studi di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)

Gisanda Farsa Iswara, Dr. Nurini Aprilianda SH. M.Hum, Dr. Bambang Sudjito
SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: gisandafarsa@gmail.com

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional mempunyai peran sangat penting untuk mengungkap alat bukti pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba yang melalui proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan. Namun pada saat melakukan penanganan terhadap tindak pidana tersebut, Badan Narkotika Nasional mengalami beberapa kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Badan Narkotika Nasional menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba, serta mengetahui berbagai kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan. Dalam melakukan proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan, Badan Narkotika Nasional mengalami kendala yang diataranya; kurangnya sumber daya penyidik yang dimiliki Badan Narkotika Nasional, alamat tersangka yang terlacak terkadang adalah alamat fiktif dan identitas palsu, belum ada kerjasama dengan instansi luar negeri, masih banyak pengendali dari dalam NAPI, dan Badan Narkotika Nasional masih kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah; melakukan kerjasama dengan instansi luar negeri seperti DEA dan interpol, pelacakan beberapa rekening pelaku sampai ditemukannya identitas pelaku yang kemudian akan dilakukan cek posisi, perlunya penambahan sumber daya anggota penyidik, serta pelatihan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara berkala.

Kata Kunci: Pengungkapan Alat Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkoba

ABSTRACT

The National Narcotics Agency has a very important role to uncover evidence of money laundering derived from a narcotics crime through the process of investigation, arrest, and investigation. However, during the handling of the

crime, the National Narcotics Board having some problems. The purpose of this study is to describe and analyze how the National Narcotics Agency handle money laundering derived from drug crimes, as well as knowing the obstacles identified and efforts made. In conducting the arrests, and investigations, the National Narcotics Board experience some constraints such as; lack of resources of the investigator which owned by the National Narcotics Board, the suspect addresses which tracked sometimes are fictitious address and its a fake identity, there is no cooperation with foreign institution, many of the NAPI handler, and National Narcotics Board are still has a difficulties in doing cooperation with Correctional Institution.. While efforts are being made to overcome these obstacles is; cooperation with foreign agencies such as the DEA and Interpol, tracking multiple accounts until the discovery of the identity of the doer who then would be a check position, the need for additional resources investigator members, as well as training in money laundering investigations on a regular basis.

Keyword: *Evidence Disclosure, Crime of Money Laundering, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba.

¹ Rio Sungsang Wienahyu, **Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2012, hal 30

Selain itu, pembentukan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam menerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.²

Banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan narkotika banyak dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat.

Definisi yang komprehensif dan baku mengenai *money laundering* tidak ada, namun secara populer *money laundering* (pencucian uang) didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang seringkali dilakukan oleh organization crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut.

Dirty money atau uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan istilah “uang haram”, diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Praktik pencucian uang adalah suatu cara untuk melakukan penyembunyian, penghilangan jejak, atau penyamaran atas hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku.

² Aziz Syamsuddin, 2011, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 90.

Pencucian uang kemudian akan digunakan sebagai perlindungan atas uang hasil kegiatan ilegal tersebut, untuk itu peraturan atau ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menutupi tindak pidana narkoba.³

Definisi formal dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau perlu diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Cara demikian adalah suatu tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian disembunyikan dan disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah sebagai harta kekayaan sah. Upaya untuk menjauhkan atau menyamarkan itu dilakukan dengan cara menjauhkan antara pelaku dan harta kekayaan hasil pidana tersebut.

Mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual yang tinggi, memiliki kekuasaan (sosial, politik maupun ekonomi) dan didukung dengan jaringan yang luas, maka pelaku dapat dengan mudah memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 hingga diubah secara parsial dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hanya sedikit kasus pencucian uang yang sampai di sidang pengadilan, karena proses pembuktiannya cukup sulit. Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana

³ Dedy Chandra Sihombing, **Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012, hal 12

diperlukan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diantara alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah petunjuk, yang merupakan alat bukti tidak langsung. Dalam Pasal 38 UU TPPU diatur secara khusus mengenai alat bukti. Selain alat bukti dalam KUHAP, juga dipergunakan alat bukti lain berupa informasi dan dokumen.

B. PERMASALAHAN HUKUM

- 1) Apa kendala Badan Narkotika Nasional dalam upaya mengungkap alat bukti tindak pidana pencucian uang berbasis narkoba?
- 2) Bagaimana cara mengatasi kendala Badan Narkotika Nasional dalam mengungkap alat bukti tindak pidana pencucian uang berbasis narkoba?

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Badan Narkotika Nasional

Untuk Perundang-undangan Badan Narkotika Nasional belum sampai pada tahap Surat Edaran yang dibuat dari Badan Narkotika Nasional ke daerah-daerah tertentu. Karena Badan Narkotika Nasional adalah instansi baru, maka masih banyak hal yang harus dilakukan seperti harus membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Kesehatan Universitas Indonesia dan Akuntan Publik. Antara Badan Narkotika Nasional dan PPATK telah menandatangani MoU untuk program P4GN. Sebagai sinkronisasi / harmonisasi antara Badan Narkotika Nasional dengan PPATK, Badan Narkotika Nasional meminta keterangan (*inquiry*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada PPATK,

dan PPATK pula yang memberi hasil seperti memberi keterangan ahli baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun untuk hadir di sidang, bahkan kedua instansi ini sering mengadakan rapat / komite pencucian uang yang pesertanya juga instansi-instansi yang terkait dengan pencucian uang. Maksud dari *Inquiry* LHP disini adalah meminta analisis data keuangan dari tersangka narkoba, Badan Narkotika Nasional meminta nomor rekening dan profil tersangka kepada PPATK. Meskipun Badan Narkotika Nasional tidak meminta pun, PPATK tetap akan memberikan laporan tersebut kepada Badan Narkotika Nasional karena PPATK berwenang untuk menganalisa semua rekening terutama yang berkaitan dengan pelaku narkoba. Dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Universitas Indonesia, jumlah pengguna narkoba di Indonesia dapat dikatakan sangat mangkhawatirkan, yakni 1,5 % dari seluruh populasi masyarakat Indonesia, atau setara dengan 2 hingga 3 juta orang. Karena itu jika tidak diantisipasi, maka jumlah pengguna narkoba tersebut dapat bertambah dan target Badan Narkotika Nasional untuk menuju Indonesia yang terbebas dari pengaruh narkoba pada 2015 akan sulit diwujudkan. Kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Akuntan Publik sudah ada MoU yang telah ditandatangani dan sudah ada persiapan dan antisipasi untuk mengusut kasus tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba, namun belum bisa dilaksanakan dan sampai saat ini belum ada kasus yang melibatkan BPKB. Kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang transaksi narkoba untuk usaha lain yang dibentuk secara legal seperti membeli aset-aset mewah, dan sebagainya.⁴

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *predicate offence*. Maka sebenarnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada pencucian

⁴ Hasil Wawancara dengan Sundari Ssos, MH, selaku Direktur Wastabaset (Pegawasan Tahanan, Barang dan Aset) Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 16 Mei 2014

uang tanpa terjadi *predicate offence*. *Predicate offence* adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan oleh proses pencucian uang, yang dalam UUTPPU diatur dalam pasal 2 terdiri dari 23 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya mencapai 4 tahun ke atas,⁵ salah satu jenis kejahatan ini adalah narkoba.

Selain itu perlu dipahami pula bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan yang sangat tergantung pada tindak pidana asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif. Dalam ketentuan UUTPPU dimaksud penanganan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan penyidikan juga diberikan kepada Badan Narkotika Nasional.

Dengan mengaitkan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang maka penyidik termasuk Badan Narkotika Nasional harus menyelidiki dan menyidik dua kejahatan sekaligus. Selain unsur tindak pidana narkotikanya tentu Badan Narkotika Nasional harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur objektifnya maupun unsur subjektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasat

⁵ Yenti Garnasih, **Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik**, http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/10042014105556_Dr.%20Yenti%20Garnasih.%20S.H..%20M.H%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG%20dr%20yenti.pdf, diakses pada tanggal 22 Juni 2014

mata, serta dilakukan dengan cara yang rumit⁶ sehingga mempersulit pihak Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan.

Pihak yang melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun korporasi yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah/legal maupun tidak sah/ilegal. Kejahatan pencucian uang ini akan semakin sulit terlacak apabila pelaku menggunakan teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian diperlukan suatu peningkatan profesionalisme dan juga integritas para penegak hukum dalam mencari bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifatnya yang *white collar crime*. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyidik di dalam struktur Badan Narkotika Nasional adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Narkotika Nasional dan juga penyidik Polri yang ditugaskan oleh Badan Narkotika Nasional. Sesuai yang tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang yang berbunyi; "*Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.*" , dan ada pula saksi dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu;

⁶ *Ibid*

- 1) PPATK,
- 2) Penangkap pelaku,
- 3) Pihak yang memasok uang dari hasil usaha yang haram.

Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup akan terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Maka, segala kasus pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asalnya narkoba, Badan Narkotika Nasional yang akan menyidik kasus tersebut.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, penyidik harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di dalam persidangan, dan untuk perkara pencucian uang, uang bukan masalah yang mudah, apalagi dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Peran penyidik juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini di luar negeri. Kemajuan di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara, maka dari itu untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar negara. selain itu pelacakan aliran dana terkait hasil narkoba pada umumnya harus melalui pelacakan terlebih dahulu pada orang yang terlibat tindak pidana narkotikanya, yang dalam hal ini sampai saat ini masih sering mudah dilacak karena mereka menggunakan teknologi telepon seluler, disini Badan Narkotika Nasional mengetahui

dimana saja uang mereka berada dan pada tahapan selanjutnya bisa meminta data dari PPATK tentang rekening pelaku pencucian uang.

Badan Narkotika Nasional bisa juga melacak dari pembicaraan yang sering kali berupa sandi, maka akan diketemukan dimana dan kemana saja aliran dana hasil kejahatan pelaku berputar. Namun akan menjadi lebih sulit jika mereka menggunakan teknik tradisional seperti hanya berupa perintah sandi tetapi tidak menggunakan fasilitas teknologi tetapi benar-benar perintah dengan sandi dan antar kurir. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional mengetahui bahwa terdapat kasus pencucian uang bisa dari laporan masyarakat, pengembangan kasus, maupun temuan sendiri. Selain dengan pengembangan kasus, Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan pencucian uang. Selama proses penyelidikan, penyidik akan melihat dari profil, pekerjaan, dan penghasilan tersangka yang sudah terlacak. Hasil setelah dilakukannya penyelidikan akan ditemukan alat bukti seperti berupa transaksi, rekening dan alat bukti lainnya.

Tetapi telah nampak peran penyidik tidak selalu harus menunggu laporan atau hasil investigasi dari PPATK, bisa saja dan sangat mungkin penyidik melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus seperti ini misalnya penyidik telah mempunyai bukti awal tentang adanya aliran dana narkoba pada rekening seseorang yang sedang diperiksa terkait jaringan narkoba maka penyidik yang harus berinisiatif meminta bantuan PPATK untuk rekening tertentu.⁷

2. Pemanfaatan Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang

KUHAP juga tidak memberikan pengertian tentang alat bukti, akan tetapi dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah

⁷ Hasil Wawancara dengan Sundari Ssos, MH, selaku Direktur Wastabaset (Pegawasan Tahanan, Barang dan Aset) Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 16 Mei 2014

adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁸ Jadi bisa dikatakan alat bukti adalah untuk menjerat tersangka dengan adanya barang bukti yang ditemukan.pada proses penyelidikan dan terdapat beberapa dasar hukum yang berkaitan untuk menjerat tersangka, dasar hukum tersebut bisa dengan kumulasi maupun berdiri sendiri, untuk kasus narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digunakan Pasal 112 (memiliki, menguasai), 114 (menjual, membeli, menerima) jo Pasal 132 mufakat, sedangkan untuk kasus pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 digunakan Pasal 3 (memproses pencucian uang), pasal 4 (menyembunyikan, menyamarkan, dan pasal 5 (menerima, menguasai penempatan).⁹

Selain menjerat dan mengungkap tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, penyitaan dan perampasan aset dari hasil kejahatan tersangka akan menjadi bagian utama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana. Sistem hukum pidana perlu dibangun dengan adanya peraturan yang membahas mengenai penyitaan dan perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan dalam bentuk Undang-undang yang diatur secara komprehensif dan terintegrasi dengan peraturan lain dan berlaku bagi dunia nasional maupun dunia internasional. Perampasan aset ini diatur pula dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Penyidikan Perkara Narkoba.

Prosedur penyitaan sama halnya dengan prosedur jika akan melakukan penyidikan, untuk melakukan penyitaan juga harus melalui

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, **Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia**, hal 19

⁹ Hasil Wawancara dengan Sundari Ssos, MH, selaku Direktur Wastabaset (Pegawasan Tahanan, Barang dan Aset) Badan Narkoba Nasional, pada tanggal 23 Mei 2014

prosedur mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan izin / persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri maka kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk memutuskan tentang barang-barang yang disita tersebut. Permintaan izin penyitaan tersebut harus dilampiri dengan *Resume* atau rangkuman dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana yang disidik. Ketua Pengadilan Negeri setempat disini dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya, dan hal ini perlu diketahui agar tidak terjadi kekeliruan.¹⁰ Guna melakukan penyitaan, maka penyidik harus:

- a) Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi jika dalam keadaan yang mendesak harus segera bertindak, penyitaan boleh segera dilaksanakan tanpa mendapat surat izin tersebut tetapi dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- b) Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka yang diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana.
- c) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya darimana benda itu bisa disita dan dapat meminta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.

¹⁰ Leden Marpaung, (2009), **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Jakarta: Sinar Grafika, hal 95

- d) Membuat berita acara penyitaan dan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya, Ketua Lingkungan dan dua orang saksi, kemudian turunan berita acara tersebut disampaikan kepada Atasan Penyidik dan orang yang bersangkutan yang barangnya disita.

Dengan dibuatnya berita acara penyitaan , maka pelaksanaan penyitaan telah selesai.¹¹

Setiap tindak pidana pasti ada waktu (*tempus delictie*) dan tempat (*locus delictie*) peristiwa tersebut terjadi. Begitupun juga dengan tindak pidana pencucian uang, sering kali bandar narkoba tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kapan tersangka mulai melakukan kejahatan pencucian dari narkoba ini. Bisa saja tersangka mengakui bahwa tersangka mulai melakukan kejahatan ini dari tahun 2014, tetapi jika penyidik membuka rekening tersangka yang pada kenyataannya tersangka melakukan pencucian uang dari tahun 2007, maka disitulah *tempus delictie* dimulainya tersangka melakukan pencucian uang. Penyidik mengetahui hal demikian dengan cara melihat nama penyetor ataupun nama orang yang disetor sejak tahun 2007, dari situlah tersangka tidak akan bisa menghindar lagi karena sudah terbantahkan dengan bukti fakta rekening tersebut. Sedangkan *locus delictie* yaitu dimana kejadian itu terjadi, setelah penyidik melacak tentang adanya suatu tindak pidana pencucian uang berupa transaksi, dan bukti lain, maka penyidik melakukan pemeriksaan di TKP. Hasil pemeriksaan TKP akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. BAP di TKP ini merupakan salah satu alat bukti sah, yaitu alat bukti surat,¹² jadi berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, baik tersangka menggunakan *mobile banking* maupun *internet banking*,

¹¹ *Ibid*, hal 97-98

¹² *Ibid*, hal 80-81

jadi *locus* nya adalah dimana tersangka tertangkap atau dimana rekening tersebut dibuka.¹³

Alat-alat yang biasa digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ini adalah Rekening, ATM, Token, Internet, Handphone, *Internet Banking*, dan juga laptop. Namun, dalam perampasan aset, aset-aset yang telah disita tersebut bukan merupakan alat bukti, melainkan barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP bahwa barang bukti adalah barang yang ditemukan oleh penyidik yang mana barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan alat bukti adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam kuhap, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bisa saja tersangka terjatuh meskipun barang bukti asetnya tidak ada. Tersangka yang dimaksudkan disini adalah seorang pengendali kejahatan, karena yang disebut pengendali kebanyakan tidak menyentuh sama sekali barang bukti kejahatannya, yaitu narkoba, Pengendali hanya mengendalikan peredaran narkoba dan pengendali keuangan saja. Dalam hal mengenai pembagian hasil dari bisnis narkoba, sebelum pengendali menyuruh kurir-kurirnya, dia pasti sudah menjanjikan dengan keuntungan yang sangat menggiurkan yang akan dibagikan kepada kurir tersebut, hasil dari kejahatan tersebut dibagi sesuai keuntungan masing-masing. Jadi, pengendali akan menginformasikan kepada kurir bahwa akan ada uang masuk ke dalam rekening kurir, lalu kurir disuruh untuk mentransfer uang tersebut kepada pengendali dalam keadaan sudah dipotong dengan keuntungan kurir yang sudah dijanjikan oleh pengendali. Saat ini, kebanyakan setiap pelaku narkoba tertangkap karena transaksi yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah transaksi perbankan, maka dari itu justru sekarang ini banyak modus pencucian uang yang kembali dilakukan dengan cara tradisional, yaitu melalui transaksi keuangan secara

¹³ Hasil Wawancara dengan Iptu Chakim, SH, MM, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 24 Mei 2014

tunai sehingga sulit untuk dibuktikan dan dilacak. Tetapi selama ini dapat dikatakan bahwa kunci utamanya adalah penyadapan, karena dengan tidak dilakukannya penyadapan tersebut tidak akan diketahui bahwa ada transaksi tunai yang dilakukan oleh pelaku, maka harus lebih diperkuat penyadapannya.¹⁴

Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.¹⁵ Keterangan saksi atau saksi yang meringankan adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.¹⁶ Karena sering kali adanya transaksi perbankan, tersangka biasanya melakukan kejahatan pencucian uang dari narkoba menggunakan rekening anak atau istrinya. Jadi jika salah satu atau kedua rekening yang digunakan oleh tersangka tersebut terlacak bahwa ada aliran dana hasil kejahatan akan tetap diperiksa. Dan yang jelas anggota keluarga tersangka akan menjadi saksi yang meringankan di dalam persidangan jika tersangka meminta keluarganya untuk didatangkan dan dijadikan saksi, tapi satu orang saksi dalam persidangan belum bisa disebut sebagai saksi, minimal dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan entah itu saksi yang akan memberatkan atau meringankan. Sedangkan dalam alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Chakim, SH, MM, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 24 Mei 2014

¹⁵ Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981

¹⁶ **Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Alibi,**
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2014

pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

Saksi ahli atau saksi yang memberatkan adalah saksi tindak pidana asalnya yang keterangannya memberatkan terdakwa karena telah terbukti setelah diperiksa ada aliran dana dari rekening yang digunakan oleh pelaku narkoba sekaligus untuk meng-*counter* kebohongan tersangka. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini keterangan ahli diberikan oleh PPATK dan ahli *money laundering*. Saksi dari bank dibutuhkan untuk dilakukannya pemeriksaan, karena itu adalah saksi fakta terhadap transaksi perbankan yang dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya alat bukti surat, alat bukti surat salah satunya adalah mutasi rekening, buku tabungan, slip transfer, cek, deposito, giro, dan semua yang berkaitan dengan transaksi perbankan. Yang bisa dijadikan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah sertifikat tanah, kendaraan (bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB), saham, dan yang terkait dengan harta kekayaan.¹⁸

Alat bukti petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 KUHP, bahwa petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya.¹⁹ Jika dalam kasus TPPU, alat bukti petunjuk bisa melalui media elektronik, seperti *m-banking*, hubungan komunikasi (BBM, SMS, dll) dan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Hampir 99% penyadapan terhadap penggunaan hubungan komunikasi BBM, sisanya untuk informan hanya 1%.

¹⁷ Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Arminto Rohadi, SH, MH, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 24 Mei 2014

¹⁹ Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981

Cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah dengan transaksi secara tunai maupun transaksi secara perbankan yang biasanya transaksi tersebut dilakukan dengan rekening palsu pelaku, dan rekening palsu tersebut dibuat dengan E-KTP yang palsu pula. Transaksi tunai merupakan transaksi yang cukup sulit dilacak oleh penyidik Badan Narkotika Nasional dikarenakan tidak ada jejak transaksi, sedangkan dalam transaksi perbankan masih bisa dilacak oleh PPATK, karena PPATK masih bisa melakukan pemberhentian transaksi untuk sementara apabila ada orang yang diduga melakukan transaksi sebagai hasil kejahatannya.

3. Kendala Badan Narkotika Nasional Dalam Mengungkap Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika

Pentingnya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik juga harus cerdik dalam menentukan teknik penyelidikan dilapangan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas penyidik dengan cara; 1) *Observasi* (pengamatan), 2) *Interview* (Wawancara), 3) *Undercover* (Penyamaran), dan 4) *Surveillance* (Pembuntutan). Kemudian setelah semua proses penyelidikan sudah dilakukan dengan mendapatkan *data record* atas semua nomor rekening tersangka dan alat bukti lain, maka alat bukti bisa dirampas dan alat bukti tersebut minimal ada dua alat bukti, baru kemudian dilakukan penangkapan. Jika baru satu alat bukti yang ditemukan, penyidik harus mencari alat bukti lain. Tetapi karena kejahatan ini dinamakan jaringan narkotika, walaupun baru seorang yang tertangkap, jika dibuka semua *data base* nya hanya dengan mengetikkan nomor rekening yang tersangka gunakan dan tersangka memang diketahui atau diduga kuat bahwa dia adalah pemain narkotika, maka semua bukti

transaksi tersangka akan muncul dengan sendirinya, dari jaringan satu ke jaringan lainnya akan terhubung dengan menggunakan *software* yang disebut *analys notebook*.²⁰

Pada prinsipnya dalam kasus pencucian uang ini, terutama tindak pidana asalnya adalah narkoba, ada pihak yang berhak mengajukan alat bukti pada proses persidangan, pihak tersebut adalah Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang untuk membuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dan pihak terdakwa atau penasehat hukum yang mempunyai hak untuk meringankan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan atau bisa disebut sebagai alat bukti yang bersifat meringankan. Sedangkan perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP.

Alat bukti yang sah diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban oleh Penuntut Umum, Hakim karena jabatannya juga mencari tambahan bukti.²¹ Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum. Karena hakim dalam proses

²⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Chakim, SH, MM, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 24 Mei 2014

²¹ Leden Marpaung, (2009), **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Jakarta: Sinar Grafika, hal 24-26

persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu, hakim bisa memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan seorang saksi. Demikian sebaliknya, apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.²²

Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengungkapkan alat bukti dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi eksternal dan segi internal diantaranya adalah;

1. Kendala Badan Narkotika Nasional dari segi Eksternal

- A) Badan Narkotika Nasional mendapatkan aplikasi pembukaan rekening. Dalam hal melakukan pelacakan terhadap tersangka, aplikasi tersebut digunakan dan kemudian akan ditemukan identitas dan alamat tersangka. Namun setelah dilakukan survey langsung, ternyata alamat yang telah ditemukan lewat aplikasi pembuka rekening tidak benar. Jadi dapat dikatakan bahwa alamat tersangka yang telah terlacak terkadang adalah alamat

²² Burhan Nudin Sasmito, **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007, hal 25

fiktif dan menggunakan identitas (KTP) palsu untuk membuat rekening palsu pula.

- B) Badan Narkotika Nasional belum melakukan kerjasama dengan instansi luar negeri yang mengusut dan menangani tindak pidana narkoba.
- C) Masih banyak pengendali dari dalam Nara Pidana (NAPI). Dalam NAPI terdapat aturan tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi, tetapi sering kali NAPI tetap berbekal alat komunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dalam hal itu, NAPI biasanya hanya mencuri-curi kesempatan bagaimana caranya saja agar NAPI bisa bekerjasama dengan sipir di LP, tetapi memang pada faktanya sudah ada peraturan bahwa di dalam LP tidakizinkan untuk menggunakan alat komunikasi.
- D) Izin Badan Narkotika Nasional untuk memasuki LP harus sesuai dengan prosedur hukum dan para petugas LP pun melakukan aturan yang telah ditetapkan. Tetapi jika Badan Narkotika Nasional meminta izin untuk masuk ke LP, maka petugas LP seolah mengulur waktu dengan cara menanyakan bagaimana prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, melihat aturan jam berkunjung NAPI, petugas LP juga masih harus menghubungi Kepala LP terlebih dahulu. Bahkan terkadang ada oknum LP yang bekerjasama dengan NAPI

sehingga menyulitkan penyidik, walaupun sudah ada izin untuk masuk ke dalam LP pun sudah dikondisikan bahwa di dalam tidak akan ada barang bukti yang ditemukan untuk mendukung pembuktian NAPI tersebut. Namun jika ada tersangka lain yang tertangkap diluar LP saja sudah cukup, karena tersangka memiliki alat komunikasi sebagai bukti IT, dan identitas diri untuk mendukung pembuktian tersangka. Pendek kata, Badan Narkotika Nasional mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan LP karena harus melalui prosedur yang terlalu berbelit-belit.

2. Kendala Badan Narkotika Nasional dari segi Internal

- A) Ditinjau dari segi substansi, sementara ini Badan Narkotika Nasional tidak memiliki kendala apapun selama Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan instansi terkait seperti PPATK, BPN, TNI, Bea Cukai dan Polri. Untuk kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan TNI memang masih terhalang oleh adanya peraturan dalam KUHP Militer, namun kedua lembaga ini sudah mengeluarkan MoU bahwa TNI tetap bisa melakukan kerjasama untuk penugasan di Badan Narkotika Nasional yang hanya dibatasi sampai dengan tahap penyidikan saja, karena proses penyelidikan bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa benar adanya tersangka yang terjerat dan diduga kuat melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian setelah penyelidikan selesai akan berlanjut pada tahap

penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana hingga dilakukannya penangkapan, selanjutnya terlepas dari penanganan Badan Narkotika Nasional dan akan ditangani oleh pihak TNI sesuai peraturan dan sanksi dalam KUHP Militer. Sedangkan lembaga yang memiliki peran yang sangat besar bagi Badan Narkotika Nasional untuk kelancaran penanganan kasus tindak pidana pencucian uang terutama dari kejahatan narkoba adalah PPATK, karena jika terdapat tindak pidana pencucian uang dimanapun juga, PPATK akan sangat berperan penting untuk mengolah data rekening orang yang diduga kuat melakukan kejahatan tersebut dan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Badan Narkotika Nasional.

- B) Ditinjau dari segi struktur, Badan Narkotika Nasional masih kekurangan akan Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan dan penyadapan dalam menangani tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Tanpa adanya Sumber Daya Manusia yang cukup dari Badan Narkotika Nasional akan sangat berpengaruh besar dalam hal mengumpulkan alat bukti mengenai tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Nasional membutuhkan anggota penyidik yang lebih banyak, karena sumber daya penyidik Badan Narkotika Nasional masih kebanyakan dari Polri.

C) Ditinjau dari segi kultur, kemampuan sumber daya penyidik dari Badan Narkotika Nasional sendiri, belum dilakukannya pelatihan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara berkala dan masih minimnya pengembangan sumber penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.²³

4. Upaya Mengatasi Kendala Badan Narkotika Nasional Dalam Mengungkap Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika

Berkembangnya modus praktik tindak pidana pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang kotor yang diperoleh dari proses yang ilegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak hanya memacu aktivitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi yang tidak sah atau ilegal yang secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali sehingga terkadang penyidik menghadapi kesulitan untuk menemukan bukti kejahatannya.²⁴

²³ Hasil Wawancara dengan Iptu Arminto Rohadi, SH, MH, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 26 Mei 2014

²⁴ Lioz, **Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Kelamahan Dalam Implementasinya**, http://www.academia.edu/5196361/ANTI_PENCUCIAN_ANG_DI_INDONESIA_DAN_KELEMAHAN_DALAM_IMPLEMENTASINYA, diakses pada tanggal 23 Juli 2014

Mengenai alat bukti terdapat pula teknik pengungkapan alat bukti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menjerat tersangka, diantaranya adalah:

- 1) Mencari nomor rekening tersangka yang sudah ditangkap
- 2) CDR (*Call Data Record*) atau keluar masuknya hubungan komunikasi antara pengendali dan kurir dengan cara dibuka nomor ponsel tersangka yang kemudian akan dilakukan analisa karena setelah dilakukan pemeriksaan tersebut akan diketahui kepada siapa saja tersangka melakukan hubungan komunikasi dan Badan Narkotika Nasional akan meminta print out atas hubungan komunikasi dengan jaringannya kepada provider terkait (Simpati, XL, dan lain lain) yang dengan tujuan melakukan kejahatan tersebut, dan itu semua bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan.
- 3) Proses penyadapan juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tetapi jika akan melakukan penyadapan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengendali narkoba beserta aliran dananya harus dipayungi hukum terlebih dahulu berupa permintaan, penetapan, dan izin khusus penyadapan dari pengadilan setempat barulah bisa dijadikan alat bukti.
- 4) Setelah dibuka keseluruhan *data record* nya, nomor rekening tersangka, dari situ akan diketahui boss atau biasa disebut dengan pengendali kejahatan pencucian uang. Sejalan dengan itu akan diketahui pula jalur keuangan dan aliran dananya selama tersangka melakukan kejahatan pencucian uang.
- 5) Penyidik menyimpulkan bahwa si boss atau pengendali mempunyai rekening atau menguasai beberapa rekening. Rekening yang digunakan biasanya adalah rekening palsu atau rekening atas nama orang lain yang dikendalikan oleh tersangka.

Selanjutnya adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di dalam sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUTPPU. Dalam penyidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mengungkap alat bukti ini, dapat memanfaatkan PPATK untuk memperoleh keterangan dari PPATK negara lain atau memanfaatkan data-data dan hasil analisa yang dimiliki oleh PPATK. Di samping itu, ketentuan yang telah diuraikan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38 UUTPPU secara khusus telah mengatur adanya proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak dijalankannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dirancang secara khusus karena tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana yang dapat dikatakan baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini terlihat dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan pelaku, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan proses di dalam pengadilan.

Pemblokiran sesuai dalam UUTPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UUTPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik Badan Narkotika Nasional, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan. Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah yang senilai dengan harta kekayaan yang diketahui atau yang patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Penghasilan lain yang didapat dari harta kekayaan yang diblokir tersebut dimasukkan ke dalam klausul Berita Acara pemblokiran yang dalam hal ini harta kekayaan dalam suatu rekening yang memiliki jumlah lebih kecil dari jumlah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar harta yang terdapat di dalam rekening yang dimaksud pada saat melakukan pemblokiran. Dan sebaliknya, apabila dana yang terdapat di dalam rekening tersebut berjumlah lebih besar daripada nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang

harus dilakukan pemblokiran adalah hanya sebesar harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, harta yang telah diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka dari itu aktivitas rekening tidak akan terganggu, dengan ketentuan jumlah harta yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang. Jumlah harta yang ada pada rekening tersebut untuk sementara diblokir secara keseluruhan dengan menggunakan syarat Penyidik Badan Narkotika Nasional/PU/Hakim dalam surat perintah untuk pemblokiran dan Berita Acara Pemblokirannya harus mencantumkan mengenai kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang harus dilakukan pemblokiran. Mengenai tata cara pemblokiran, perintah pemblokiran tersebut harus dibuat secara tertulis dan secara jelas menyebutkan poin-poin yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) UUTPPU dengan kemudian tembusannya ke PPATK, dan juga mencantumkan secara jelas pasal di dalam UUTPPU yang diduga telah dilanggar.

Menurut informasi dari pihak Badan Narkotika Nasional, terdapat upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dari setiap kendala-kendala dari segi eksternal maupun internal yang selalu muncul dalam pengungkapan alat bukti tindak pidana pencucian uang, dari kejahatan narkoba, diantaranya:

1. Upaya Badan Narkotika Nasional Untuk Kendala Segi Eksternal
 - A) Melakukan kerjasama Internasional atau kerjasama dengan instansi luar negeri, seperti *Drug Reinforcement Administration* (DEA) yang biasa melakukan penelusuran profil. DEA adalah lembaga penegak hukum di Amerika Serikat yang bertugas memerangi penggunaan dan penyelundupan narkoba dan Interpol yang merupakan kepolisian Amerika Serikat yang bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

- B) Seorang pelaku yang menggunakan alamat fiktif sering kali menggunakan beberapa rekening, dan upaya Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara melacak beberapa rekening tersebut sampai ditemukannya identitas pelaku termasuk, nama, alamat, dan nomor telepon pelaku untuk selanjutnya dilakukan cek posisi (cekpos) terus menerus sehingga petugas Badan Narkotika Nasional menemukan tempat tinggal pelaku yang stasioner, baru kemudian dilakukan penyadapan hubungan komunikasi pelaku dengan jaringan yang lainnya. Setelah komunikasi pelaku dengan kurir/jaringan lain tersadap, maka akan dianalisa oleh analis Badan Narkotika Nasional kepada siapa saja dan berapa kali pelaku melakukan transaksi tersebut dengan jaringannya. Upaya kedua dari Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi kendala ini adalah menginstruksikan kepada semua Bank untuk lebih memperketat masalah pembukaan rekening untuk menghindari adanya tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang.
- C) Untuk menghindari terjadinya pengendalian kejahatan pencucian uang yang terjadi dalam napi adalah pihak Badan Narkotika Nasional membuat MoU kepada pihak Dirjenpas, maka untuk mengatasi kemungkinan adanya pihak Dirjenpas yang bekerjasama dengan Napi yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dari bidang kebudayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional akan melakukan penyuluhan di setiap Lembaga Pemasyarakatan tentang narkoba secara berkala, serta menyarankan Dirjenpas untuk lebih diperketatnya masalah hubungan komunikasi seperti mendisfungsikan hubungan komunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Baru-baru ini, Badan Narkotika Nasional juga sudah mempunyai pegawai Dirjenpas yang dipekerjakan yang membidangi tahanan di dalam Badan Narkotika Nasional.

2. Upaya Badan Narkotika Nasional Untuk Kendala Segi Internal

- A) Upaya untuk mengatasi kendala Badan Narkotika Nasional dari segi substansinya, dari anggota TNI masih aktif dan tunduk kepada KUHP Militernya. Namun demikian, bila terjadi kasus adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, bisa dilakukan penyidikan dari militer itu sendiri, dan bisa juga dilakukan penyidikan koneksitas yang mana penyidikan ini merupakan penyidikan gabungan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang tidak ditugaskan oleh Badan Narkotika Nasional ataupun Polri yang ditugaskan oleh Badan Narkotika Nasional dan penyidik TNI. Jadi jika ada oknum TNI yang tertangkap oleh polisi reserse narkoba, barang-barang pelaku akan disidik dan pelaku tindak pidana tersebut akan diberi sanksi yang tetap mengacu pada peraturan kemiliteran, namun selagi masih ada upaya banding, maka harus menunggu sampai upaya tersebut mempunyai keputusan hukum yang tetap, jika dalam upaya banding lebih diperberat, maka akan diajukan kasasi, dan jika upaya kasasi dikukuhkan lagi vonisnya, maka akan berlanjut pada tahap terakhir, yaitu Peninjauan Kembali. Bila keputusan pada tahap Peninjauan Kembali masih saja tetap, maka akan dilakukan sidang kode etik militer untuk melakukan pemecatan. Setelah dipecat, pelaku oknum TNI tersebut harus menjalani hukuman yang dijatuhkan sesuai vonis dan akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan umum
- B) Upaya untuk mengatasi kendala Badan Narkotika Nasional dari segi strukturnya adalah perlunya penambahan anggota sumber daya penyidik Badan Narkotika Nasional.

- C) Upaya untuk mengatasi kendala Badan Narkotika Nasional dari segi kulturalnya adalah dengan cara dilakukannya pelatihan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara berkala.²⁵

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Melalui pembahasan dan hasil analisa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kendala dari segi eksternal, pembukaan rekening dan profil (KTP) tersangka yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang disurvei langsung ke lapangan, dan aturan yang belum berjalan dengan efektif mengenai pelarangan masuknya alat komunikasi untuk narapidana sehingga masih banyak menyulitkan petugas Badan Narkotika Nasional untuk membatasi kegiatan para nara pidana dalam menemukan, mengungkapkan bukti-bukti yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta prosedur aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan masih terlalu rumit untuk Badan Narkotika Nasional dalam hal menemukan barang atau alat bukti untuk mendukung pembuktian nara pidana tersebut.

Sedangkan kendala dari segi internal, dari sisi substansi, struktur, dan kultur, kendala dalam sisi kultur itulah yang menjadi hambatan yang paling menonjol, salah satunya adalah kurangnya pelatihan penyidikan yang dilakukan secara berkala antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Polri yang menyidik secara teliti dan terus

²⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Arminto Rohadi, SH, MH, selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 28 Mei 2014

menerus serta kurangnya jumlah penyidik Badan Narkotika Nasional karena mayoritas penyidik yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional adalah penyidik polri.

- b. Setelah dilakukannya pelatihan penyidikan antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik polri, Badan Narkotika Nasional bisa melakukan penambahan anggota penyidik karena kesuksesan dalam penanganan pengungkapan alat bukti dari tindak pidana ini sangat bergantung pada petugas Badan Narkotika Nasional dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik.

2. Saran

- a. Berdasarkan kendala dari segi eksternal, Badan Narkotika Nasional harus memberikan instruksi atau pengarahan kepada instansi lain yang terkait dengan pencucian uang untuk lebih diperketat lagi tentang peraturan mengenai pembuatan identitas diri atau KTP dan pengawasan mengenai adanya transaksi dengan nominal yang tidak wajar dan adanya tindak pidana dari transaksi tersebut. Selain itu, kebijakan yang diatur dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih dipertegas mengenai pengawasan dan pelarangan untuk membawa alat komunikasi agar nara pidana tidak bisa lagi menggunakan alat komunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan berdasarkan kendala dari segi internal, Badan Narkotika Nasional memerlukan peningkatan sumber daya penyidik PNS dari Badan Narkotika Nasional sendiri dan peningkatan kerja sama dengan

penyidik polri sehingga diadakan pelatihan penyidikan antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik polri untuk menyinergikan tugas bersama sehingga para penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik polri bisa bekerjasama dengan baik dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan meminimalisir adanya tindak pidana tersebut yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari.

- b. Badan Narkotika Nasional perlu melakukan kerjasama dengan beberapa negara dan instansi-instansi dari luar negeri selain DEA yang memiliki keterkaitan dengan pengusutan tindak pidana narkoba sampai dilakukannya penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang mempergunakan narkoba tersebut untuk diselundupkan, disalahgunakan, dan menggunakannya sebagai tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Arief Amirullah, Money Laundering : Tindak Pidana Pencucian Uang, Edisi Pertama, 2003
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Poernomo, Money Laundering Persepsi Hukum Nasional, Jakarta, FH Jayabaya, 2001
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- PPATK, Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, Indonesia, 2012
- Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003
- Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, 1983
- Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Romli Atmasasmita, Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis, Kencana: Jakarta, 2010
- Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001
- Soedjono D, Hukum Narkotika Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982
- Soesilo, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Bogor: Politeia, 1989
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004

JURNAL:

Indriyanto Seno Adji, **Pidana Mati Bagi Koruptor sebagai Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi**, Jurnal Keadilan, Jakarta, 2001

Rahmi Dwi, Andi Seri, Muhadar, **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Fakultas Hukum Unhas, Jurnal, Makassar.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SKRIPSI:

Burhan Nudin Sasmito, **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Unversitas Brawijaya, Malang, 2007

Dedy Chandra Sihombing, **Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012

Rio Sungsang Wienahyu, **Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Unsoed, Purwokerto, 2012

INTERNET:

Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alatbukti-dengan-barang-bukti>, diakses pada tanggal 23 April 2014

Damang, **Keterangan Saksi**, <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html>, diakses pada tanggal 23 April 2014

- Dea Rhinofa, 2011, **Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Money Laundering Hasil Tindak Pidana Narkotika**, http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2011/03/29/20110329063610-9651.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2014
- Edi Nasution, **Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan**, <http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juli 2014
- Irawan, **Sekarang Gembong Narkoba Bisa Dipidana Pencucian Uang!**, <http://regional.kompasiana.com/2013/11/22/gembong-narkoba-divonis-pencucian-uang-610254.html>, diakses pada tanggal 23 September 2014
- Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa**, <http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-petunjuk-keterangan-terdakwa.html>, diakses pada tanggal 26 April 2014
- Lioz, **Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Kelamahan Dalam Implementasinya**, http://www.academia.edu/5196361/ANTI_PENCUCIAN_UANG_DI_INDONESIA_DAN_KELEMAHAN_DALAM_IMPLEMENTASINYA, diakses pada tanggal 23 Juli 2014
- PPATK: Kian Sulit Melacak Kejahatan Kaum Kerah Putih**, <http://www.infobanknews.com/2012/05/ppatk-kian-sulit-melacak-kejahatan-kaum-kerah-putih/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2014
- PPATK e-learning, **Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendaanaan Terorisme**, http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/2/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2014
- Riza Kuriniawan, **Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Dalam Tindak Pidana Narkotika**, http://www.researchgate.net/profile/Riza_Kurniawan4/publication/253646304_Perampasan_Aset_Hasil_Tindak_Pidana_Narkotika_Sebagai_Alternatif_Pemidanaan_Dalam_Tindak_Pidana_Narkotika/file/3deec51f9e71c945eb.docx, diakses pada tanggal 13 Juni 2014
- Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana**, <http://jurnalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses tanggal 25 April 2014
- Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Alibi**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2014

Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35146/3/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2013

Tujuan Pokok dan Fungsi, <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2014

Yenti Garnasih, **Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik,**
http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/10042014105556_Dr.%20Yenti%20Garnasih,%20S.H.,%20M.H%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG%20dr%20yenti.pdf, diakses pada tanggal 22 Juni 2014